

Penataan Kota Bandung:



Ekspresi Kesemrawutan



Kawasan Jeans Cihampelas. Biar macet, yang penting untung

Secara mikro, pembangunan di Kota Bandung sering dikritik tidak konsisten dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Sering terjadi, tanpa pertimbangan yang matang, Pemda dengan mudahnya memberikan izin untuk membangun pusat-pusat perdagangan. Seperti plaza, pertokoan, gedung perkantoran di lokasi yang peruntukannya semula bukan untuk itu.

Belakangan, lokasi inilah yang menjadi sumber kemacetan. RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) kadang kala dilanggar. Pengawasan tata ruang kita masih lemah. Peran developer cenderung dominan, hingga perkembangan kota mengikuti situasi pasar.



Sebagian kesemrawutan Kota Bandung terjadi akibat tidak konsistennya pelaksanaan RUTRK. Tingginya tekanan pembangunan di Kota Kembang ini membuat Pemda dihadapkan pada dua pilihan, yaitu tetap memberikan izin atau menolak rancangan proyek yang tidak sesuai dengan RUTRK.

Sulit memang, sebuah pilihan seperti ibarat makan buah simalakama: “dimakan

Sejak berlakunya PP No. 16 tahun 1987, batas administrasi Kotamadya Daerah tingkat II Bandung berubah dari luas 8098 ha menjadi 16.729,650 ha.

ibu mati, tidak dimakan bapak mati”. Seperti pusat pertokoan *jeans* di Jl. Cihampelas yang berasal dari gagasan mantan Walikota Bandung, Ateng Wahyudi. Alasannya, daripada (sebagian) warga Bandung jadi pengangguran, lebih baik daerah itu (Cihampelas) dapat menampung tenaga kerja. Kawasan itu akhirnya menjadi salah satu pusat kemacetan di Bandung.

Jika pendapatnya demikian, tidak salah juga. Namun, bisakah Bandung menjadi kota yang mampu menampung kegiatan warganya pada khususnya dan warga Jawa Barat pada umumnya, yang segala kepentingan seluruh masyarakatnya dari segala lapisan dapat terakomodasi secara optimal. Karena untuk membuat Bandung nyaman, banyak sekali fungsi kota yang harus diemban, yang berkorelasi erat dengan tingkat pelayanan (daya dukung ruang) dan hasil pembangunan itu sendiri. *Toh*, kota-kota di manapun selalu memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan budaya. Kesemuanya itu merupakan jaminan untuk memenuhi hajat hidup yang mestinya harus menjadi tanggung jawab Pemda pada masyarakat.

Sebenarnya, konsep perencanaan kota modern, sebagaimana kita kenal sekarang, adalah sebuah konsep perencanaan yang lahir dalam konteks perkembangan masyarakat Eropa pada awal abad ke-20, yang ketika itu mengalami proses industrialisasi besar-besaran (*Galion*, dalam tulisan Ir. H. Juniarso Ridwan di harian Pikiran Rakyat tahun 1994). Perencanaan kota modern pada dasarnya, adalah membentuk manusia

modern, melalui penataan ruang kota, yaitu dengan mempercepat laju modernisasi dan memberikan ruang berkembangnya kekuatan-kekuatan ekonomi sejalan dengan prinsip *urban economic*. Metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan itu adalah pertama, membagi ruang kota menjadi daerah-daerah yang monofungsional seperti lingkungan industri, komersial, rekreasi, perkantoran, dan pemukiman. Kedua, menciptakan mobilitas yang tinggi di dalam ruang maupun antar ruang (Ir. H. Juniarso Ridwan dalam tulisannya di Pikiran Rakyat tahun 1989).

Konsep perencanaan kota sungguh penting. Bagaimana mungkin suatu kota dibangun tanpa konsep? Kota akan berkembang tanpa arah dan kendali, yang pada kondisi jangka panjangnya kota akan menjadi “mati”. Karena potensi-potensi habis sebagai akibat dari tidak digunakannya paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Bagaimana Rencana Bandung?

Sejak berlakunya PP No.16 tahun 1987, batas administrasi Kotamadya Daerah tingkat II Bandung berubah dari luas 8098 ha menjadi 16.729,650 ha. Perluasan daerah administrasi Kotamadya Daerah tingkat II Bandung ini, sebenarnya telah direkomendasikan dalam Rencana Induk Kota (RIK) Bandung 2005, karena adanya kebutuhan tanah untuk pengembangan berbagai kegiatan Kota Bandung yang tidak mungkin lagi dapat ditampung dalam batas administrasi yang lama. Walaupun tidak secara rinci dipaparkan, luas wilayah yang diusulkan tidak jauh berbeda dengan format batas administrasi yang ada.

Wilayah perencanaan yang difokuskan dalam RIK Bandung 2005 adalah batas administrasi lama. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, batas wilayah perencanaan kota terkait erat dengan batas administrasi kota. Berdasarkan PP No. 16 tahun 1987 tentang perluasan wilayah administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Bnadung, maka wilayah perencanaan Kota Bandung harus mengikuti batas baru.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, perlu adanya penyesuaian wilayah perencanaan. Rencana Induk Kota (RIK) Bandung 2005 perlu ditinjau kembali. Hal lain

yang perlu mendapat perhatian adalah menurut pasal 33 dan 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 bahwa setiap lima tahun sekali perlu adanya peninjauan kembali/evaluasi terhadap rencana kota yang telah disahkan.

Berdasarkan perkembangan pertumbuhan Kota Bandung yang dimulai sejak abad 18, Kota Bandung tumbuh dengan pesat tanpa arah yang jelas. Baru pada tahun 1971, dengan disepakatinya *master plan*, Kota Bandung dikembangkan menjadi kota dengan fungsi: pusat pemerintahan, pusat pendidikan tinggi, pusat perdagangan, pusat industri, dan pusat kebudayaan.

Di dalam RIK Bandung 2005, fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam *master plan* tersebut masih ditetapkan kembali sebagai fungsi Kota Bandung. Fungsi Kota Bandung yang telah ditetapkan ini memberikan peluang kegiatan yang sangat luas sehingga memacu pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandung yang pesat. Masalah-

masalah klasik perkotaan pun muncul di Bandung seperti: arus urbanisasi yang tinggi, persoalan-persoalan transportasi, disparitas kepadatan penduduk, terkonsentrasinya/tercampurnya kegiatan komersial pada satu kawasan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi tersebut, di dalam RIK Kota Bandung ditetapkan kebijakan perlunya pemindahan sebagian fungsi Kota Bandung. Kegiatan yang dipindahkan ini antara lain fungsi primer yang bersifat mengganggu dan mengotori (kegiatan industri, grosir, pergudangan, dan sebagainya) dipindahkan ke Jl. Soekarno Hatta. Fungsi lain yang dipindahkan adalah fungsi sekunder dalam rangka mengurangi terkonsentrasinya kegiatan tersebut di Kota Bandung. Fungsi sekunder yang dipindahkan adalah aktivitas perguruan tinggi swasta dan kegiatan pemerintahan Kabupaten Daerah tingkat II Bandung.

Sejak RIK Bandung 2005 disahkan, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tidak memberikan izin lagi bagi



Pusat perbelanjaan Plaza Bandung Indah. Menambah aktivitas perdagangan di jalur utama

Rence



industri-industri baru untuk berlokasi di tengah-tengah kota. Dengan kebijakan ini, diharapkan industri-industri tersebut dapat dialihkan pada kawasan yang telah ditentukan, atau pada kota-kota kecil di sekitar Bandung.

Aktivitas pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Bandung dipindahkan ke Soreang. Aktivitas perguruan tinggi dipindahkan ke Jatinangor, walaupun baru perguruan tinggi negeri bukan swasta seperti yang direkomendasikan dalam RIK Bandung 2005. Begitu juga dengan pembangunan pasar induk, juga telah terealisasi di Gede Bage dan Caringin (keduanya terletak di Jl. Soekarno-Hatta).

Pola kebijakan yang telah ditetapkan di atas masih belum berjalan sempurna. Ini terlihat dari semakin banyaknya industri baru yang muncul tidak sesuai rencana, terutama pada kawasan pinggiran Kota Bandung. Aktivitas perdagangan juga terlihat melebar ke sepanjang jalur-jalur utama. Beberapa pusat sekunder yang direncanakan juga terlihat belum ada. Masalah utama adalah kesesuaian harga lahan dan preferensi lokasi, yang menjadi pertimbangan utama untuk mendapatkan kemudahan dan keuntungan

lokasi. Besarnya skala aktivitas perdagangan yang ada di Bandung tidak dapat dipisahkan dengan semakin besarnya jumlah penduduk Kota Bandung. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial bagi perkembangan perdagangan. Demikian pula dengan perguruan tinggi swasta, belum ada yang dipindahkan ke Jatinangor, malah semakin memperbesar skala aktivitasnya dengan membangun gedung-gedung baru. Masalah utama dalam hal ini adalah terbatasnya areal yang ada di Jatinangor untuk menampung seluruh aktivitas perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Bandung.

Untuk menyusun strategi pengembangan Kota Bandung, ada hal-hal pokok yang harus diperhatikan: Kota Bandung berdasarkan data dari tahun-tahun 1980 s.d. 1990 memiliki tingkat perkembangan penduduk rata-rata sebesar 1,86% per tahun. Jumlah penduduk pada tahun 1990 berdasarkan hasil sensus tercatat sebesar 2.056.915 jiwa, dan berdasarkan hasil perhitungan ulang akan mencapai 2.388.175 jiwa pada tahun 2000 dan 2.509.448 pada tahun 2005.

Berdasarkan perkembangan penduduk di atas, tampak adanya peningkatan yang pesat di



Lalu lintas di Jalan Merdeka. Masalah arus lalu lintas belum mendapat perhatian serius

berbagai kegiatan usaha kota dan mobilitas. Hal lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah kuatnya kecenderungan perkembangan kawasan-kawasan pinggiran dan kantong-kantong bagian wilayah selatan dan timur kota, sebagai kawasan tempat tinggal dan penempatan berbagai kegiatan fungsional perkotaan. Walaupun demikian, dominasi kegiatan masih terlihat pada kawasan kota-madya lama, terutama pada pusat kota. Pada wilayah terbangun yang ada, tampak adanya gejala penetrasi kegiatan komersial pada jaringan utama dan kawasan tempat tinggal. Pola perkembangan yang terakhir ini menyebabkan terjadinya pola penggunaan lahan campuran pada beberapa bagian wilayah kota.

Tingginya laju pertumbuhan kendaraan bermotor terutama kendaraan penumpang (6,1%), kendaraan komersial (3,9%), dan kendaraan angkutan umum (4,1%), tidak diikuti dengan penambahan jaringan jalan yang ada. Hal ini menyebabkan tingkat pelayanan jalan berdasarkan kapasitas jalan menjadi rendah karena terjadi perlambatan pada jam-jam puncak perjalanan. Terkonsentrasinya kegiatan komersial pada pusat juga menyebabkan arus pergerakan bertumpu pada jalan di kawasan pusat kota. Hal ini menyebabkan sering terjadinya perlambatan arus lalu lintas, bahkan kemacetan. Usaha pendistribusian beban arus lalu lintas belum mendapat perhatian serius Pemda.

Dalam usaha untuk mengantisipasi perkembangan kota tersebut, perlu beberapa usaha untuk meningkatkan intensitas dan kapasitas yang telah ada. Usaha ini perlu dibarengi dengan persyaratan yang ketat dalam hal penyediaan fasilitas penunjang untuk kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah seminimal mungkin dampak negatif yang ditimbulkan.

Implementasi Bandung Adalah Kesemrawutan

Perkembangan Bandung cukup pesat di satu sisi banyak memberikan aspek penting, misalnya dengan dijadikannya Kota Bandung sebagai pusat perdagangan, perindustrian, pendidikan, hiburan, dan rekreasi. Tetapi di lain pihak, aspek-aspek negatif yang mengiringinya juga tidak kalah banyak.

Penyimpangan terhadap RUTRP (Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan) yang disusun Pemda Tk. I, yang mendapat limpahan wewenang dari pemerintah pusat, merupakan

hal yang sudah dianggap alamiah. Apalagi penyimpangan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang lebih rendah kedudukannya. Semisal Pemda Tk. II, yang menerima limpahan tugas dari pemerintah pusat untuk menyusun RUTRK, RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota), dan RTRK (Rencana Teknik Ruang Kota).

Mengamati gejala yang timbul ini, Juniarto Ridwan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan kota modern terdapat tiga kelompok masyarakat yang menentukan, yaitu kelompok pemodal, kelompok profesional (para ahli), dan pemerintah. Terjadinya pembangunan yang tidak tertib disebabkan interaksi antara ketiga



Prof. Ateng Syafrudin, SH.

"Perlu suatu lembaga monitoring efektif untuk mengontrol peruntukan lahan."

Rani



kelompok pelaku pembangunan sebagai suatu kelembagaan tidak berlangsung secara seimbang.

Hal ini didukung juga oleh **Ir. M. Hatta Ahadis, M.Sc** (Direktur Pembinaan Pembangunan Perkotaan Ditjen Pembangunan Daerah Depdagri). Ia menyatakan, pembangunan perumahan pemukiman atau kota-kota baru di Indonesia tergolong unik. Peralannya, peran swasta dalam hal ini sangat dominan. Sehingga konsekuensinya, revisi tata ruanglah yang kemudian menyesuaikan pada lokasi kota baru yang sudah terbangun. Semuanya ini disebabkan antara lain oleh pengendalian oleh pemerintah pusat atau Pemda yang tidak efektif. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) yang ada tidak cukup memadai, baik kualitas maupun kuantitas, untuk mengawasi pembangunan yang cukup luas dan kompleks tersebut. Kondisi-kondisi demikianlah yang membuka peluang bagi pengembang untuk merubah peruntukan ruang hijau menjadi peruntukan lain, seperti rumah toko (ruko) dan sebagainya. Untuk mengantisipasi hal ini, **Prof. Ateng Syafrudin, S.H.** (Guru Besar Hukum Tata Ruang Unpar dan sekaligus Rektor Unwim) menegaskan perlunya suatu lembaga *monitoring* yang efektif. Selama ini, walaupun di jajaran struktur organisasi Pemda terdapat badan yang berfungsi

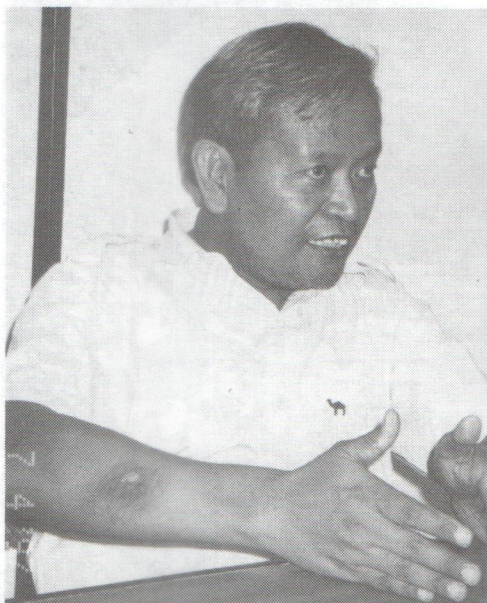
melakukan evaluasi dan *monitoring*, namun belum berjalan baik. Justru hal demikian banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga ilmiah dari kalangan akademisi dan dari berbagai profesi. Sedangkan perangkat hukum dalam mengatur tata ruang kota, sebenarnya sudah cukup memadai. Kendalanya hanya pada masalah pelaksanaan, termasuk tindakan-tindakan hukumnya yang masih belum optimal.

Sementara itu, agar perencanaan tata ruang yang dibuat pemerintah

dapat ditaati atau berlaku efektif, maka bupati atau walikotamadya harus mengundang pakar-pakar dari segala disiplin ilmu untuk meminta gagasan. Kota-kota yang maju adalah kota yang walikotanya berani memberdayakan pakar-pakar. Jadi menurut **Ir. Sandi A. Siregar** (Dosen Teknik Arsitektur Unpar), pada hakekatnya pejabat itu hanya *administrator* saja. Soal rencana dan desain harus dikaji mendalam oleh ahlinya. Hal ini untuk mencegah penyimpangan dan konflik kepentingan berbagai pihak, karena sudah diantisipasi secara dini. Di beberapa kalangan sedang dipertanyakan, apakah suatu RUTRK itu dapat berfungsi untuk jangka panjang. Apa tidak lebih baik *structure plan*-nya atau pengendaliannya saja yang diatur, karena perkembangan yang berasal dari swasta sangat besar. Jika suatu instrumen hukum dalam bentuk RUTRP, RUTRK ataupun *master plan* harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan ke depan, kalau hal ini tidak dapat dipenuhi maka akan terus terjadi penyimpangan.

Dalam praktek yang lebih kongkret dan teknis **Ir. Mochtarrram Karyoedi, M.Sc.** (dosen Planologi ITB) berpendapat bahwa RUTRK tidak bisa dipakai sebagai satu-satunya pegangan, sehingga harus diikuti rencana rincinya, seperti: RDTRK. Tapi, kadang-kadang RDTRK tidak cukup detail untuk bisa mengakomodasikan keinginan-keinginan investor. Sehingga, sewaktu pemberian izin timbul negosiasi antara investor dengan walikota. Sementara itu, Mochtarrram menyatakan keheranannya terhadap proyek pembangunan Bandung Super Mall di Jl. Gatot Subroto yang tidak ada di RUTRK. Padahal, jalan tersebut saat ini sudah rawan akan kemacetan. "Saya tidak tahu kenapa di Jl. Gatot Subroto itu ada proyek Bandung Super Mall yang di RUTRK tidak ada. Kecuali jika jalan tersebut diperlebar, sehingga tidak akan menimbulkan kemacetan yang lebih parah bila proyek itu selesai," katanya.

Sebaliknya, di bagian utara, tepatnya di Sarijadi, sebenarnya sudah dari dulu ada rencana dibangun pusat kegiatan komersil. Namun, baru terealisasi sekarang yaitu Setrasari Mall. Sedangkan, di daerah Sukaluyu yang rencananya juga dibangun pusat kegiatan serupa, ternyata hingga saat ini belum terealisasi. Hal ini, menurut Mochtarrram, mungkin disebabkan tidak adanya faktor yang bisa menyebabkan daerah ini berkembang pesat. Di



ParaHyangan

Ir. Mochtarrram Karyoedi, M.Sc.
"RDTRK tidak cukup detail untuk bisa mengakomodasikan keinginan investor."

daerah lain diberi izin, sementara daerah yang diproyeksikan kurang dikembangkan dan dipromosikan. Saat ini, yang sesuai dengan RUTRK adalah di daerah Maskumambang, dimana sudah ada pusat kegiatan komersil (supermarket, hotel, dan bioskop).

Masalah-masalah klasik perkotaan yang muncul di Bandung, memerlukan penanganan, antara lain penyusunan RUTRK yang mampu mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak. Koor-dinasi terkait dengan pihak yang berwenang mengeluarkan izin mutlak diperlukan. Jangan sampai terjadi hal-hal di mana mengajukan permohonan izin lokasi dan melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana. Tetapi anehnya, sering terjadi izin lokasi tersebut akhirnya turun juga. Lalu ada usulan dari beberapa pakar untuk membentuk suatu badan pengelola kota baru. Tugas badan ini antara lain, menyiapkan rencana tata ruang dan strategi bisnis, perizinan, koordinasi, pengerahan investasi, dan kerja sama.

Usulan lain juga diutarakan Ateng

Syafrudin yaitu: Pemda Kotamadya Bandung saat ini lebih baik memprioritaskan penyusunan RDTRK untuk daerah perluasan. Daerah Kotamadya Bandung sebelah Selatan mulanya hanya sampai Cicadas, namun sekarang sudah diperluas sampai ke Ujung Berung. "Mumpung daerah di sana belum

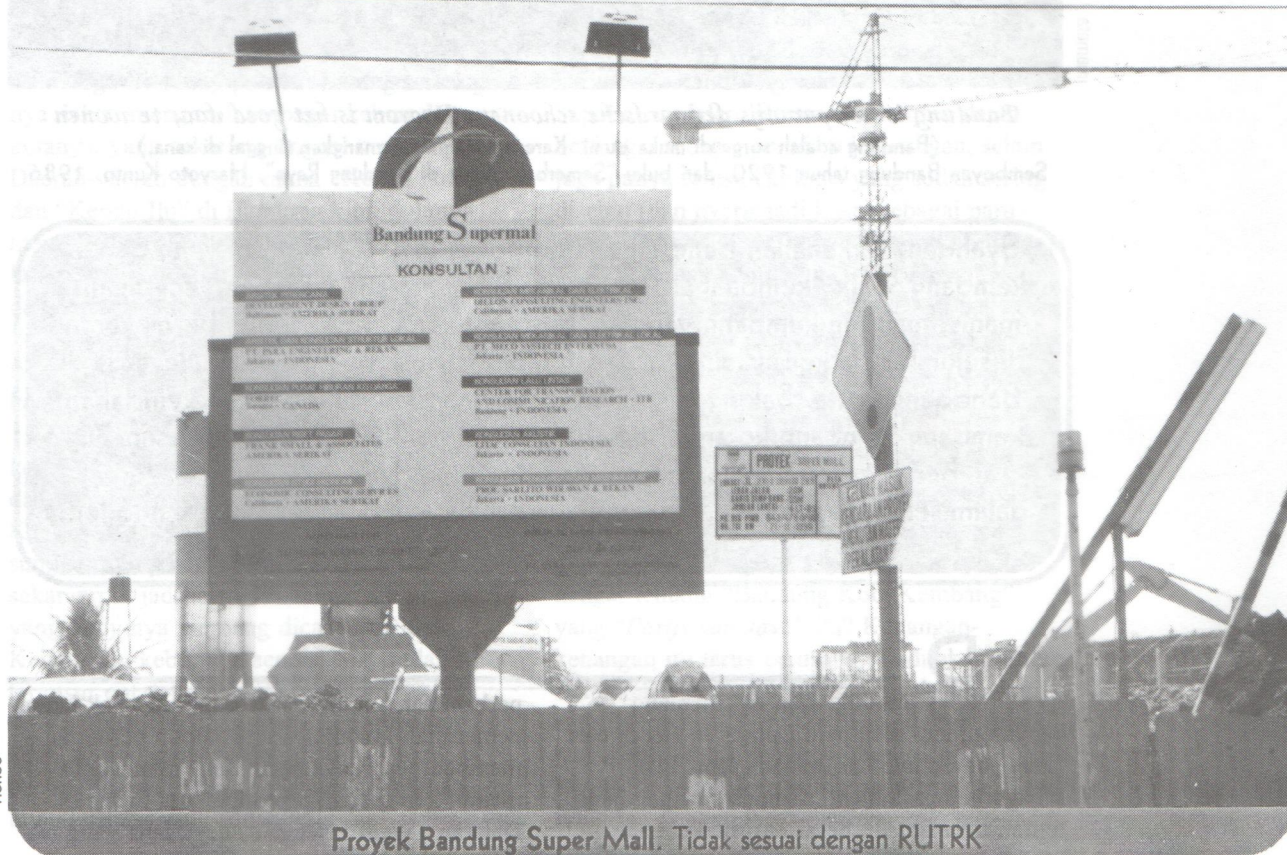


Masalah-masalah klasik perkotaan yang muncul di Bandung, memerlukan penanganan, antara lain penyusunan RUTRK yang mampu mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak.

begitu padat dan kumuh dan masih banyak ruang terbuka, sehingga memudahkan penataan ruangnya. Sebab kalau terlambat *ngutak-ngatik* daerah yang terlanjur padat, maka dalam rangka penertiban kawasan nanti, daerah itu akan susah ditertibkan dan menelan biaya besar," ujarnya.

Mengelola dan menata suatu kota bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, namun dengan kerja sama dan disiplin yang kuat, tidak ada yang mustahil.

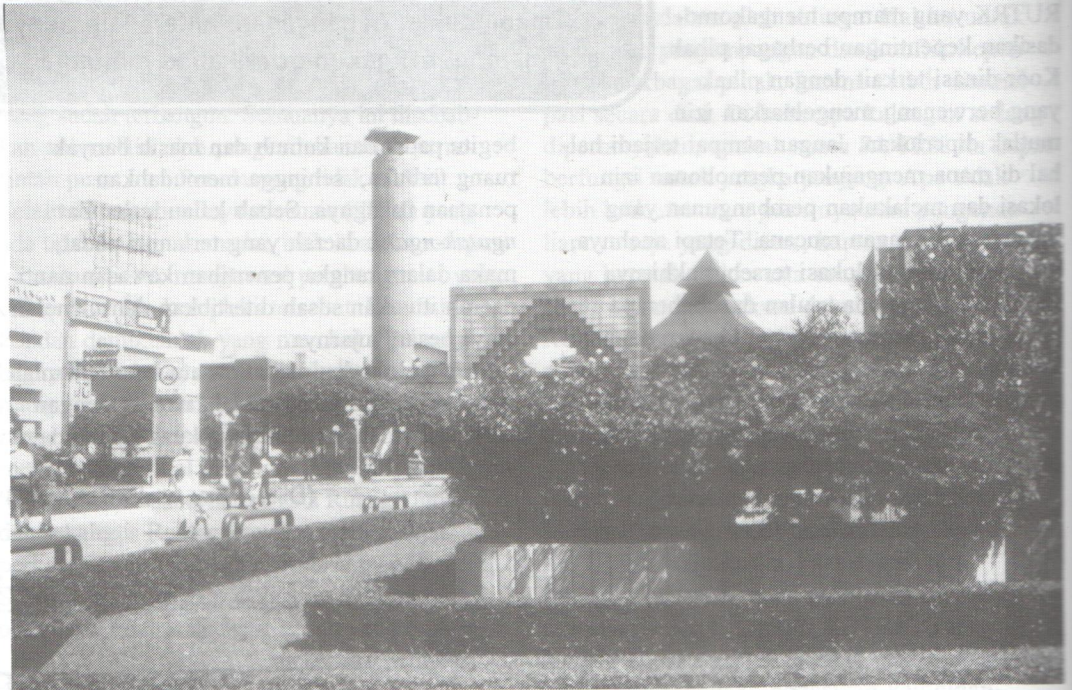
(Dheasy Suzanti dan Titi Maria)



Proyek Bandung Super Mall. Tidak sesuai dengan RUTRK



Kota Kembang Kemaruk Kenangan



Imameta

Bandung is het paradijs der aardsche schoonen. Daarom is het goed daar te wonen
(Bandung adalah sorga di muka bumi. Karenanyalah menyenangkan tinggal di sana.)
Semboyan Bandung tahun 1920, dari buku "Semerbak Bunga di Bandung Raya", Haryoto Kunto, 1986

Syahdan, terkenallah Bandung "tempo doeloe" sebagai kota yang penuh kembang, baik "kembang" berupa noni-noni mojang priangan yang manis-manis, maupun kembang yang "betul-betul kembang", harum bermekaran di sejumlah Parken, Pleinen, Stadstuinen, Plantsoenen, dan Boulevards di Bandoeng kotta. Saking yakinnya warga Bandung dulu dengan keindahan kembang-kembang kotanya, pejabat pemerintah Kota Bandung tahun 20-an berani menyetarakan kecantikan Bandung dengan keindahan surga dalam semboyan kotanya. Bandung is het paradijs der aardsche schoonen, zeg!

Bandung, kala itu, memang banyak dihuni oleh para *Dames en Heren* dari "kerajaan oranye" di Belanda sana, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai ajang tetirah *toean-toean* besar dari perkebunan-

perkebunan teh di sekitar Bandung. Tak heran, pemerintah kolonial waktu itupun berusaha membuat warganya betah dengan mencoba mendirikan sebuah prototipe kota Eropa di Dataran Tinggi Priangan ini. Usaha yang tak



sia-sia, karena kemudian pujianpun datang bertubi-tubi dari berbagai pihak, termasuk Dr. R. Nepveu, walikota Apeldoorn dari Holland, yang terkagum-kagum pada kerapian rancangan tata Kota Bandung sebagai Kota Kebun (*Tuinstad*) yang nyaman. Ir. Thomas Karsten pada 1931 menyatakan pula bahwa "Bandung merupakan kota yang dirancang sempurna, dengan tata ruang terinci." (Haryoto Kunto, *Semerbak Bunga di Bandung Raya*, 1986)

Pemerintah Kota Bandung dahulu nampaknya memang serius menggarap Kota Bandung sebagai Kota Kebun yang nyaman dihuni. Kebun-kebun atau pekarangan depan rumah warga yang tampak agak berantakan pun tak segan mereka rancang-benahi, seperti yang mereka lakukan pada perumahan di Frisiastraat (sekarang jalan Sultan Tirtayasa), misalnya. Berbagai taman tempat warga bisa bersantai dan berjalan-jalan juga banyak dibangun dengan perancangan dan pemikiran yang serius, termasuk dengan melibatkan peranserta warga dalam organisasi masyarakat seperti "*Vereeniging tot Nut van Bandoeng en Omstreken*" (Perkumpulan untuk Kemaslahatan Bandung dan Sekitarnya).

Warga Bandung pun tak kurang semangatnya dalam mengasuh berbagai kebun di kotanya, yang sekarang tinggal nama saja. Daerah-daerah dengan nama "Kebun Anu" dan "Kebun Itu" di Bandung kini, dulunya memang merupakan kebun sungguhan. Daerah Kebun Bibit di Tamansari, misalnya, dahulu merupakan kebun pembibitan kota. Sekarang, jangankan bibit, kebunpun sudah sukar dicari di daerah padat penduduk dan kendaraan itu.

Nasib serupa terjadi juga pada kebun-kebun lain, seperti Kebun Jati, Kebun Jukut, dan Kebun Kawung. Mungkin hanya daerah Kebun Kelapa saja yang sampai kini masih sungguh tampak "hijau", tapi itupun karena sekarang ia jadi terminal kendaraan umum yang *body*-nya memang dicat hijau-hijau. Kelapa dan kebunnya sendiri, *sih*, sudah tergusur entah ke mana!

Keadaan Bandung masa kini memang agak kurang menggembirakan hati para pecinta taman. Banyak *pleinen* atau lahan hijau terbuka yang sudah "disulap" jadi

pompa bensin, perumahan, atau tempat parkir. Taman-taman yang masih adapun sekarang tampak kurang terawat. Taman Ganesha alias Ijzermanspark di depan kampus ITB tampak kurang diperhatikan. Air kolam di Taman Merdeka tampak berwarna coklat muda keruh dengan sampah-sampah plastik terapung di sana. Gedung Sate, yang dulu dirancang oleh *Meneer* Gerber lengkap dengan penataan lansekap berupa taman-taman terbuka di sekitarnya, sehingga jelas menampilkan karisma gedung itu, kini sudah kehilangan sebagian tamannya. Untung, masih ada lapangan Gasibu di depan gedung bertusuk sate tersebut, sehingga warga Bandung masih punya tempat untuk *jogging*, main sepatu roda atau sepak bola, *kongkow-kongkow* dan

Bandung yang dulu terkenal sebagai "Kota Kembang" atau "Kota Kebun" itu sekarang agak sukar dicari "kekotakembangan"-nya, meski julukan kebanggaan itu masih sering disebut-sebut.

ngeceng-ngeceng tiap pagi atau sore, sambil makan kupat tahu, nasi tim ayam, atau bubur ayam.

Taman dan/atau lahan hijau terbuka memang punya fungsi sosial tempat orang berkumpul dan mengendorkan urat syaraf. Pepohonan dalam taman tersebutpun dapat berfungsi sebagai peredam kebisingan, selain juga punya fungsi ekologis yang sudah sering disebut (dan nyaris jadi klise) sebagai paru-paru kota. Selain itu, taman juga bisa berfungsi sebagai sarana pendidikan, setidaknya agar anak-anak kota jaman sekarang tahu bahwa daur hidup sayur dan buah-buahan yang sering mereka makan tidak hanya bermula di *super-market* dan berakhir di tempat sampah.

Bandung yang dulu terkenal sebagai "Kota Kembang" atau "Kota Kebun" itu sekarang agak sukar dicari "kekotakembangan"-nya, meski julukan kebanggaan itu masih sering disebut-sebut. Siapa, *sih*, yang belum pernah dengar tentang "Bandung Kota Kembang" yang "*Parijs van Java*" itu? Kenangan-kenangan itu terus berusaha dihidupkan, untuk suatu kebanggaan yang rasanya tak jelas lagi signifikansinya. Toh, kembang (dalam artian taman) sudah tak semudah dulu dicari di Bandung, sedangkan untuk menyamakan Kota Bandung dengan Paris rasanya, *kok*, mengada-

NEGORI BANDONG

ada, kalau bukan menggelikan.

Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung bukannya tak menyadari hal ini. Semenjak pertengahan 80-an, dibentuklah semboyan baru bagi Kota Bandung: "Bandung Berhiber" (Bersih Hijau Berbunga). Taman-taman kota sudah kembali dilirik dan dibenahi, meski hasilnya belum nampak maksimal. Beberapa taman kecil dibangun di persimpangan-persimpangan jalan. Bahkan sebuah monumen baru, yang awalnya diharapkan bisa jadi tempat yang nyaman buat warga Bandung untuk berkumpul dan berekreasi, sudah pula dibuat di depan lapangan Gasibu dan Gedung Sate. Sayangnya, setelah selesai, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat itu jadi *landmark* megah yang kurang interaktif: dilihat boleh dipegang jangan. Pasalnya, sekeliling monumen itu akhirnya dikelilingi pagar besi yang, sayangnya lagi, tidak nampak indah. Warga, terutama anak-anak, yang ingin bermain di lapangan sekitar monumen perjuangan itu, sempat betul-betul "berjuang" untuk masuk ke dalam lapangan, karena

mereka harus memanjat pagar tinggi yang terkunci rapat itu!

Dengan tidak mengecilkan segala yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama ini, rasanya perlu dengan jujur diakui bahwa masih banyak yang harus dilakukan dan dibenahi untuk mencapai kondisi Bandung yang "Bersih Hijau Berbunga".

Pepohonan kota yang banyak sudah "lansia" (lanjut usia), perlu dirawat dan kalau perlu diremajakan. Kondisi taman-

taman yang ada masih perlu banyak dibenahi agar tampak nyaman dan menarik, semenarik (konon) para mojang priangan! Kalau ditakutkan warga akan mengusik dan merusak taman itu, tak perlu memagari dan mengunci taman rapat-rapat sehingga cuma jadi hiasan bisu. Toh, bapak-bapak Satpam mungkin bisa diminta menjaga taman-taman itu (dengan digaji, tentu!). Kalau perlu, buatlah pengu-muan yang menjelaskan bahwa taman tersebut dibangun dari uang warga yang dibayarkan sebagai pajak, sehingga, semoga, setidaknya warga jadi merasa ikut memiliki. Rasanya, wargapun akan mengerti, asal tulisan tersebut memang lugas serta jelas, bukannya slogan panjang dan membingungkan seperti "Dengan semangat gerakan disiplin nasional, kita dukung perolehan adipura dengan menjaga kebersihan taman", misalnya.... Bukankah warga kotapun akan senang bila dapat beristirahat dengan nyaman dan tenang di taman-taman yang nyaman dan terawat rapih?

Rasanya tak perlu kita dibuai kenangan-kenangan lama tentang "Parijs van Java" yang manis itu. Bandung kiwari memang cantik, tapi kalau mau, Bandung bihari juga bisa tak kalah cantiknya! Tak perlu kecil hati meski sebuah buku panduan pelancong hanya memuat satu paragraf kecil tentang Bandung ("*Bandung is a noisy city that has nothing to offer...*"). Belum terlambat untuk memulai dan berbenah diri. Tak usah ingin terlihat seperti Paris, Tirol, Muenchen, Barcelona... Bandung adalah Bandung, Dayeuh Sangkuriang di Tatar Priangan yang perlu punya akar dan ciri tersendiri. Mungkin kita perlu lebih jelas melihat ke dalam, menggali potensi yang ada, untuk kemudian merumuskannya secara rinci dan jelas dalam rencana penataan kota. Banyak yang bisa dilakukan, banyak yang perlu dilakukan. Setidaknya, penataan daerah perluasan Kotamadya Bandung yang baru bisa dilakukan dengan belajar dari kesalahan masa lalu, sedangkan daerah kota yang lama dapat secara konsisten dijaga dan dibenahi.

Orang yang sudah cantik tak akan terus-menerus mengatakan bahwa ia cantik, karena pengakuan akan datang dengan sendirinya. Kalau memang sudah cantik dan berbunga, "julukan sayang" Bandung sebagai kota kembang akan datang dengan sendirinya, tanpa harus digaung-gaungkan terlebih dahulu.

(Rani Elsanti Ambyo)



Rani

Taman memang mempunyai fungsi sosial, yakni sebagai tempat orang berkumpul dan mengendurkan urat syaraf

Gedung Merdeka : Saksi Bisu Berbagai Peristiwa Bersejarah



inameta

Berbicara tentang gedung yang bersejarah, di Kota Bandung memang banyak. Kalau mau berbicara mengenai museum yang patut dikunjungi, di Bandung pun ada beragam. Salah satu museum yang menarik dan unik adalah Gedung Merdeka yang sekarang menjadi Museum Konferensi Asia Afrika.

Mengapa Gedung Merdeka? Sebab gedung tersebut selain mempunyai nilai sejarah yang tinggi, juga merupakan salah satu kebanggaan Bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Bandung khususnya. Bagaimana tidak, semua orang yang tertarik sejarah pastilah mengetahui, Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diselenggarakan pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955 berlangsung di gedung ini. Konferensi yang dihadiri oleh 29 negara-negara dari Kawasan Asia dan Afrika itu diselenggarakan di Indonesia yang saat

itu baru merdeka kurang dari 10 tahun. Ide pemilihan Kota Bandung sebagai tempat penyelenggaraan konferensi bertaraf internasional itu datang dari Presiden Soekarno. Pemilihan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa Kota Bandung merupakan salah satu kota perjuangan yang menentang dan mengenyahkan kolonialisme dan imperialisme dari bumi Indonesia. Selain itu, hawa Kota Bandung yang sejuk dan relatif masih ramah lingkungan serta jauh dari kebisingan dianggap dapat memberikan kenyamanan kepada peserta



konferensi.

Gedung Merdeka yang terletak di Jalan Asia Afrika 65 Bandung ini, tidak hanya sekedar saksi bisu dari peristiwa KAA yang berakhir dengan sukses besar dan berhasil melahirkan kesepakatan Dasa Sila Bandung. Sejak dibangun untuk pertama kalinya pada tahun 1895 sampai akhirnya berfungsi sebagai Museum KAA, gedung tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan fungsi. Tercatat gedung yang didirikan oleh arsitek berkebangsaan Belanda, Van Gallen Last dan C.P. Wolf Schoemaker, awalnya diberi nama Gedung *Societeit Concordia* yang dipergunakan

kan sebagai tempat tahanan politik G30S/PKI. Masih banyak lagi peristiwa penting dan bersejarah yang disaksikan oleh bangunan yang telah berumur lebih dari 100 tahun ini, sehingga ia layak dianggap sebagai gedung yang bersejarah dan dilindungi sebagai salah satu cagar budaya.

Dijadikannya Gedung Merdeka sebagai Museum KAA adalah gagasan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, SH, LLM., yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Beliau sering bertemu dan berdialog dengan para pemimpin Negara Asia dan Afrika. Mereka selalu menanya-

Gedung Merdeka yang terletak di Jalan Asia Afrika 65 Bandung ini, tidak hanya sekedar saksi bisu dari peristiwa KAA yang berakhir dengan sukses besar dan berhasil melahirkan kesepakatan Dasa Sila Bandung.

kan tentang Gedung Merdeka dan Kota Bandung, tempat diselenggarakannya KAA. Oleh sebab itu, beliau mengusulkan agar Gedung Merdeka dijadikan sebagai museum yang dapat mengi-

ngatkan dan memperlihatkan kronologis jalannya peristiwa bersejarah tersebut. Museum KAA diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 April 1980, pada puncak peringatan KAA ke-25. Adapun perawatan dan pemeliharaan Gedung Merdeka yang sekarang berfungsi sebagai museum ini, secara fisik ditangani oleh Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengelola Gedung Merdeka.

Sebagai gedung rekreasi masyarakat Belanda yang berdomisili di Kota Bandung. Pada masa pendudukan tentara Jepang, Gedung Concordia diberi nama dalam bahasa Jepang, yaitu *Dai Toa Kaikan* dan berfungsi sebagai pusat kebudayaan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, gedung tersebut digunakan sebagai markas para pemuda di Kota Bandung guna menghadapi tentara Jepang, dan sempat menjadi salah satu tempat kegiatan Pemerintahan Kota Bandung.

Sekarang, berkat perawatan yang baik, gedung tua itu masih berdiri kokoh dan anggun. Banyak tamu-tamu negara dan turis-turis asing yang berminat mengunjungi Museum KAA. Sangat disayangkan kalau ada penduduk Kota Bandung yang belum pernah berkunjung ke museum yang satu ini. Museum yang tidak memungut biaya masuk bagi para pengunjungnya ini, memamerkan sejumlah barang dan foto peninggalan KAA, perpustakaan, dan ruang audio visual yang menyajikan film dokumenter tentang KAA. Pelayanan yang ramah dari para pegawainya menjadikan museum ini memang pantas dimasukkan ke dalam agenda salah satu tujuan wisata di Kota Bandung.

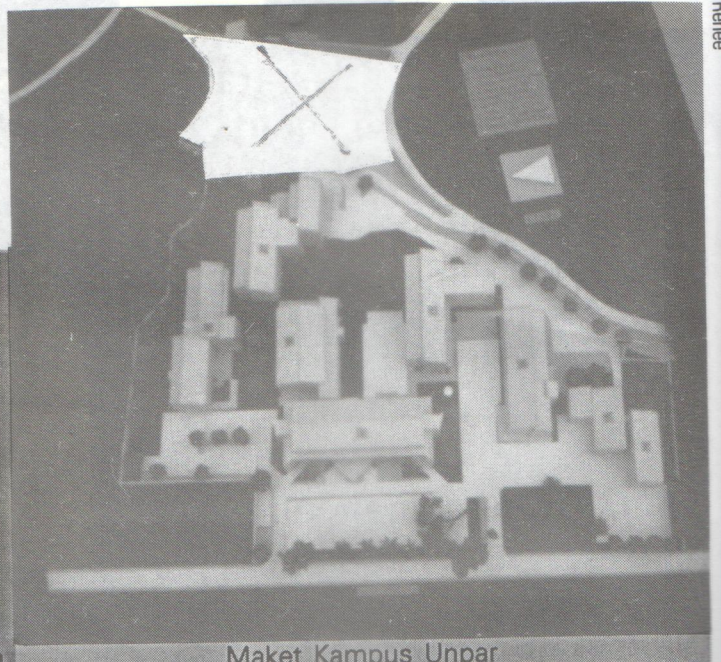
Pada Tanggal 24 Maret 1946 akibat terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, Gedung Concordia terpaksa ditinggalkan. Ketika masa pemerintahan pendudukan (1946-1950) yang ditandai dengan adanya pemerintahan Haminte Bandung, Negara Pasundan, dan Recomba Jawa Barat, gedung ini digunakan sebagai gedung pertemuan umum. Gedung Merdeka juga sempat dijadikan gedung konstituante dan Badan Perencanaan Nasional. Pada tahun 1960, ia beralih fungsi menjadi Gedung Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS), sebelum akhirnya dipindahkan ke Jakarta (1971). Ketika meletus pemberontakan G 30 S/PKI, Gedung Merdeka dikuasai oleh instansi militer dan menjadi-

(Yenny Itanaya)

Proyek Pembangunan Gedung Baru

Makin Megah, Makin Semrawut

Proyek pembangunan gedung baru Unpar sebelas lantai, yang rencananya mulai dilaksanakan bulan September 1997, ternyata akan diikuti dengan tergusurnya lapangan bola basket/tenis dan sekretariat Mahitala (X pada foto). Belum lagi proyek pembangunan itu 'mau tidak mau' akan makin menambah semrawutnya perpustakaan dan kemacetan.



Maket Kampus Unpar

Rencana pembangunan gedung baru itu diberkan oleh Pembantu Rektor (Purek) III, Ir. F.X. Budiwidodo Pangarso, MSP dalam Rapat Kerja Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Unpar di Cipanas, Garut, dari tanggal 13 sampai 17 Juli 1997 yang lalu. Gedung sebelas lantai itu nantinya sebagian besar akan digunakan untuk tempat aktivitas belajar mengajar fakultas ekonomi, satu atau dua lantai digunakan untuk tempat perkuliahan fakultas MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam), sedangkan sisanya digunakan untuk aktivitas unit-unit minat bakat dan pusat perkantinan. Dua lantai lagi digunakan sebagai *basement* untuk fasilitas parkir dosen dan karyawan. Pembangunannya diper-

kirakan memakan waktu satu sampai satu setengah tahun.

Pembangunan gedung baru itu dilaksanakan di lapangan parkir bawah Jl. Bukit Jarian. Sebagai konsekuensinya, berdasarkan keterangan Budiwidodo Pangarso, lapangan bola basket/tenis dan juga tempat sekretariat Mahitala (unit pecinta alam Unpar) yang juga berada di lapangan parkir bawah akan tergusur. Akibatnya, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis Lapangan dan UKM Bola Basket akan kehilangan fasilitas utamanya. "Maka kami sedang *mikir-mikir* mencari lapangan lain untuk tempat latihan," ujar Emil Tedjamulya, ketua UKM Tenis Lapangan ketika dihubungi ParaHyangan. Hal yang senada juga diutarakan oleh Benedictus Arnold, ketua UKM Bola Basket, seraya menambahkan bahwa unitnya saat ini sedang berusaha agar bisa berlatih di

GOR Padjajaran. Sedangkan Mahitala berdasarkan penuturan ketuanya, **Budi Cahya**, dalam waktu dekat akan memindahkan *home base*-nya, tepatnya di sebelah kantin FISIP.

Tambah Macet, Tambah Ramai

Pembangunan gedung sebelas lantai itu nantinya menambah kemegahan Unpar sebagai salah satu kampus *bona fide* yang ada di Bandung. Namun pembangunan gedung itu ternyata juga dikhawatirkan akan menambah kesemrawutan yang sehari-sehari terjadi di lingkungan Unpar, yaitu masalah kemacetan dan penyediaan fasilitas parkir mobil mahasiswa/i. Hal itu diakui sendiri oleh Budiwidodo Pangarso. "Problem yang masih dipikirkan sekarang adalah perparkiran. Jadi sekarang bagaimana menyadarkan mereka (mahasiswa-Red.) untuk tidak membawa mobil ke kampus", tegasnya. Ditambahkannya, selama proyek pembangunan gedung berlangsung, maka praktis area parkir di lapangan bawah akan ditutup.

Dikhawatirkan bila lapangan parkir tersebut ditutup, maka intensitas kemacetan justru semakin bertambah.

Oleh karena para mahasiswa/i yang membawa mobil pasti akan menyita ruas-ruas jalan di sekitar sebagai tempat parkir alternatif, terutama di Jl. Ciumbuleuit yang sehari-harinya sudah macet. Sayangnya, pihak universitas belum bisa menyediakan tempat parkir alternatif bagi mahasiswa/i-nya. "Oleh karena itu, kami akan membuat kebijakan melarang mahasiswa/i membawa mobil ke kampus," jelas Budiwidodo Pangarso.

Mengenai perpindahan aktivitas perkuliahan fakultas ekonomi dari gedung di Jl. Merdeka ke gedung yang baru nanti, Purek III Unpar tersebut menjelaskan bahwa perpindahan itu nantinya akan dilakukan setahap demi setahap, tergantung sudah berapa lantai bangunan baru itu siap ditempati. Kendati perpindahan itu masih lama, namun sudah mengundang tanggapan dari beberapa mahasiswanya. Menurut mereka, selain suasana tambah ramai, perpindahan itu nantinya akan menimbulkan *behaviour shock* bagi mahasiswa ekonomi itu sendiri. Seperti yang diungkapkan S.E. Larasati, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi 97/98. "Karena selama ini kami sudah terbiasa kuliah di kampus Jl. Merdeka," jelasnya.

(Renee Alexander)



Areal Parkir dan Lapangan Basket. Bakal tergusur

(niviA)

Renee